

## **AH Prioritaskan Penanganan Banjir**



*SUMBER : TRIBUNKALTIM SABTU, 22/02/2025*

*“Ini penting, mengingat peristiwa banjir beberapa waktu lalu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Dan karena memang kolam retensinya belum jadi”*

### **ANDI HARUN**

*Wali Kota Samarinda*

**SAMARINDA, TRIBUN** – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, pembangunan di Ibu Kota Kaltim yakni Samarinda tetap berjalan dengan prioritas pada proyek strategis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dipastikan Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) dalam periode keduanya.

Andi Harun menegaskan bahwa pembangunan proyek, seperti Teras Samarinda akan tetap berlanjut dengan skala yang telah disesuaikan. Mengingat bahwa sejak lama, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memetakan pengembangan fasilitas publik yang akan membentang disepanjang tepian Kota Samarinda.

Di tahun ini, pembangunan Teras Samarinda direncanakan mencakup dua segmen, yaitu dari Teras segmen pertama menuju Pelabuhan Pelindo dan dari Teras segmen pertama ke arah Teluk Lerong. Namun setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran, pemerintah kota hanya akan menuntaskan pembangunan segmen pertama ke arah Pelabuhan Pelindo di tahun ini. "Sehingga tuntas dan tidak berlanjut lagi seperti Teras segmen pertama," ungkapnya.

Selain pembangunan Teras Samarinda, Pemkot Samarinda juga mengalokasikan anggaran hasil efisiensi untuk infrastruktur penting lainnya, seperti pengendalian banjir. Salah satu proyek utama adalah pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang dan Sungai Siring. "Ini penting. mengingat peristiwa banjir beberapa waktu lalu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Dan karena memang kolam retensinya belum jadi, tahun ini kita alokasikan Rp30 miliar," jelas Andi Harun.

Di samping pembangunan infrastruktur, Andi Harun juga memprioritaskan sektor kesehatan dalam kebijakan anggaran. Andi Harun memastikan bahwa belanja obat-obatan di puskesmas harus tetap berjalan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Intinya kami memprioritaskan belanja-belanja yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, seperti pendidikan. Bahkan kita sudah biayai beberapa untuk rehab sekolah. Visi kita adalah pembangunan yang pro terhadap masyarakat rentan," pungkasnya. **(snw)**

Sumber Berita :

1. TribunKaltim, AH Prioritaskan Penanganan Banjir, 22/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
  1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
  2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
  3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
  4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

